

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat bergantung kepada pertanian (Adisasmita, 2010). Sistem pemerintahan Indonesia yang paling kecil yaitu pemerintahan desa, Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah selain itu memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kesatuan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya dimana Desa yang dipimpin oleh kepala desa serta memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan memiliki peran dalam mengelola pemerintahannya. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada Pemerintah desa dalam menerapkan prinsip yang mengelola pemerintahannya, semua kegiatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan keputusan yang berlaku. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Pemerintahan desa meliputi pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Dalam pemerintahan desa mencakup kepala desa dan perangkat desa, sedangkan dalam perangkat desa mencakup sekretaris desa dan pelaksana kewilayahan (Idris, 2022). Tata pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pertanggungjawaban dan penyusunan anggaran belanja desa. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa pembangunan Desa diharapkan memiliki kualitas yang baik serta positif bagi masyarakat Desa. Desa memiliki wewenang dalam mengelola keuangannya, dan juga memiliki kewajiban untuk menyusun APB Desa dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat maka desa harus menyusun APB Desa (Sobarudin, 2019). Dana Desa merupakan dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan (Lili, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas dana desa merupakan anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa. Dana desa merupakan bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk membangun hubungan keuangan yang baik, perlu memahami otoritas pemerintahdesa. Artinya, anggaran negara yang dialokasikan ke desa sepenuhnya dikhususkan untuk lembaga pembangunan dan akan memperkuat desa sebagai salah satu lembaga yang berkontribusi terhadap bentuk pemerintahan. Dana tersebut perlu digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Dana Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan dan pelaksanaan desa. (Hafid, 2017)

Laporan keuangan Desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan akuntansi keuangan desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu Pengukuran kinerja sangat penting untuk akuntabilitas dalam mewujudkan kinerja pemerintah, dimana pengukuran kinerja dapat membantu dalam mengelola dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja sangatlah penting bagi pemerintah, Pengukur kinerja laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk mengetahui baik buruk laporan keuangan. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk mengetahui secara efektif laporan keuangan, dimana dapat diketahui perkembangan laporan keuangan dari ke masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009). Menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan daerah dengan melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kinerja laporan keuangan pemerintah Desa akan membantu kepala desa dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana secara baik yang telah disediakan pemerintah pusat. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu mengetahui informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan posisi dari keuangan suatu pemerintah daerah (Wiratna, 2015). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangannya. Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa merupakan bagian terpenting untuk

pengelolaan keuangannya dalam menilai kinerja pemerintahan untuk mengelolah keuangan Desa (Sobaruddin, 2019). Menurut Sonny, S (2003) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai aktivitas suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga dalam mengelola dana. Manajemen dana ini dapat berarti bertujuan untuk memperoleh, menggunakan, serta mengelola aset untuk mencapai tujuan usaha. Menurut (Suteja, 2018) Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menguraikan suatu laporan keuangan dan melihat hubungan antar komponen di dalam laporan keuangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan keuangan perusahaan sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam pembuatan suatu keputusan bisnis maupun investasi. Menurut (Fahmi, 2018) kinerja keuangan yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Melalui pembangunan desa diharapkan masyarakat desa memiliki jaminan hidup yang sejahtera dalam pedesaan. Tidak hanya melalui pengelolaan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tetapi melalui pemberdayaan masyarakat Desa juga yang artinya upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai, perlu perhatian khusus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, didampingi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dengan adanya pendidikan ini maka akan membentuk masyarakat yang mempunyai sumber daya yang berkualitas dan pola pikir yang lebih baik.

Tabel 1. 1

Data Tingkat Perkembangan di Kecamatan Jombang kabupaten Jember 2022

Desa	Tingkat berkembang
Padomasan	Cepat berkembang
Keting	Cepat berkembang
Jombang	Cepat berkembang
Ngampelrejo	Cepat berkembang
Wringin agung	Cepat berkembang

Sumber: Rekap Input Epdeskel Kabupaten Jember Tahun 2022

Dari tabel 1.1 diatas dapat di simpulkan bahwa kecamatan jombang kabupaten jember tingkat perkembangan sangat baik. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui seberapa efektif dan tidak kinerja Keuangan desa dengan mengukur menggunakan alat analisis rasio yang sering di gunakan oleh penelitian terdahulu untuk melihat sejauh mana desa itu berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan peneltian menunjukan bahwa anaisis kinerja keuangan desa merupakan fondasi keuangan dan untuk mengetahui keuangan desa baik saat ini maupun dimasa lalu (Kuswadi, 2005). Pengukuran kinerja sangat penting untuk mengetahui akuntabilitas dalam mewujudkan kinerja pemerintah, dimana pengukuran kinerja dapat membantu dalam mengelola dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja sangatlah penting bagi pemerintah. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk mengetahui secara efektif laporan keuangan, dimana dapat diketahui perkembangan laporan keuangan dari masa lalu ke masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009).berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:bagaimana analisis kinerja keuangan Desa Wringin agung Kecamatan jombang Kabupaten Jember .

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan kinerja Keuangan desa Terhadap Manajemen Keuangan di Desa Wringin agung Kecamatan jombang Kabupaten Jember .

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah di uraikan, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini:

1. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah Desa berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian agardapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

2. Bagi akademis

Sebagai informasi, pengetahuan dan juga dapat menjadikan acuan di bidang manajemen khususnya keuangan

3. Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah keuangan desa dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang terbaru pada pelaksanaan alokasi dana desa